



RENCANA KERJA (RENJA)



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN TARAJU
TAHUN ANGGARAN 2025**

Alamat : Jln. Raya Taraju No. 206 Kode Pos. 46474

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT. atas limpahan Rahmat Taufik dan HidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah ini suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Taraju Tahun 2025.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Taraju Tahun 2025 ini adalah dalam rangka Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Taraju. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja (RENJA) ini.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Taraju ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sekian, semoga Alloh SWT. senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya.

Taraju, Januari 2025

Camat Taraju



H. RONI RUHIMAT, S.Sos., M.Si

NIP. 19760530 199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
	ii
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Taraju	4
1.4 Maksud dan Tujuan	7
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	8
 BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan renja SKPD Tahun 2024	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Taraju	28
2.3 isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Taraju	31
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	34
2.5 Penelaahan Usulan program dan kegiatan Masyarakat	41
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN TARAJU	42
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Taraju	43
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Taraju TA. 2025	51
 BAB IV PENUTUP	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengacu dari Permendagri No.86 Tahun 2017 Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang.

Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Taraju yaitu “**KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR**”

yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:a. Sekretariat daerah;b. Sekretariat DPRD;c. Inspektorat;d. Dinas;e. Badan; danf. Kecamatan.

Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan

Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Taraju disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589):
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan;

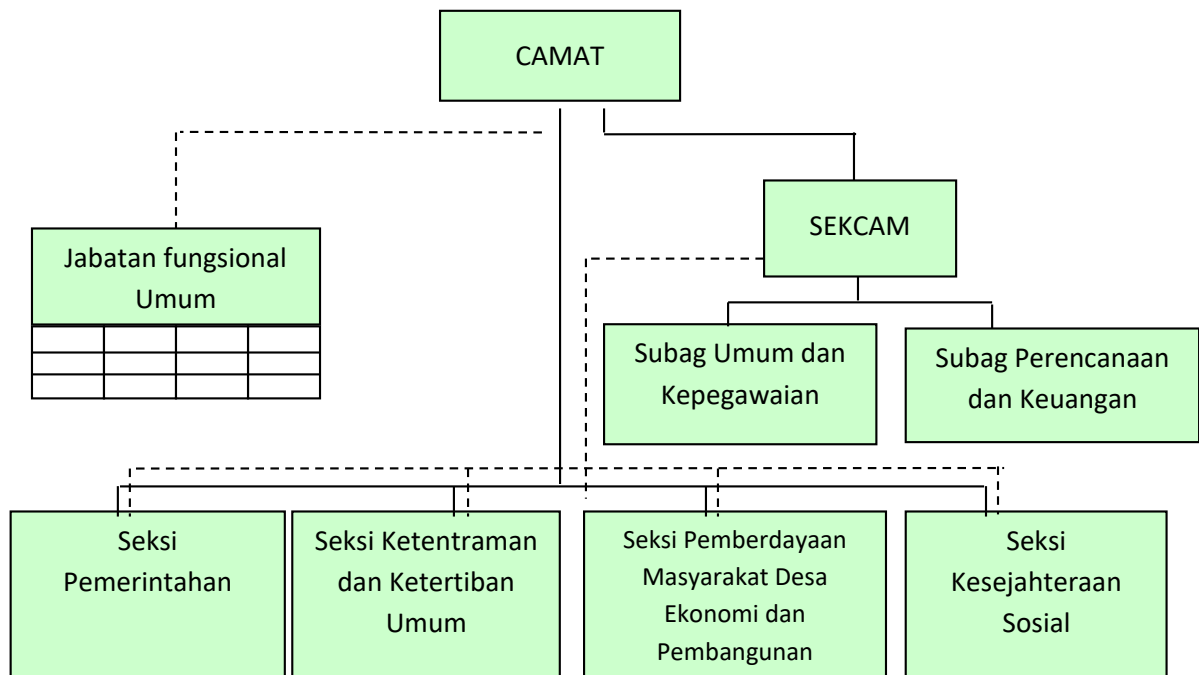
1.3. Struktur Organisasi Kecamatan Taraju

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Kecamatan dapat dilihat dari gambar 1 di bawah ini.

Gambar – 1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Nama Pejabat Struktural Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan data per Januari Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Camat : H. Roni Ruhimat,S.Sos.,M.Si
- Sekretaris Kecamatan : Ade Asep Wahyudin,
S.Sos.,M.Si
- Kasubag Umum dan Kepegawaian : Tata Kuswata, S.IP
- Pengelola Barang Milik Daerah : Cintya Wilianti
- Kasubag Perencanaan dan Keuangan : Rahmat, S.IP
- Bendahara Penegluaran : Rifki Ihsan Priyatna, A.Md
- Kasi Pemerintahan : Heri Resdiana, SE
- Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum : Tantan Hermawan, S.IP
- Pengelola Ketentraman dan Ketertiban : Mumin Mutakin
- Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan : Dudung Widana,ST
- Kasi Kesejahteraan Sosial : Nanang Ahmad Najib,S.IP

Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS di Kantor Kecamatan Taraju adalah 14 orang :

- PNS : 11 orang
- Tenaga Sukarelawan : 3 orang

1.4. Maksud Dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada seluruh aparatur Kecamatan Taraju dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan ditetapkan dalam kurun waktu 1 Tahun (Tahun 2025) dapat tercapai.
2. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2025 yang mengacu visi, misi dan program Kabupaten Tasikmalaya guna mendorong partisipasi aparatur dan masyarakat di wilayah Kecamatan Taraju.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan Kecamatan Taraju Tahun 2025.
4. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan di Tahun 2025.
5. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Taraju.
6. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Renja Kecamatan Taraju dengan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

1.4.2 Tujuan

1. Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Taraju Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

4. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan Taraju dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan;
5. Mewujudkan perencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif dan bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
6. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kerja antar instansi di Kecamatan Taraju.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Taraju dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Taraju tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Taraju
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TARAJU TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024, Tahun Berjalan 2024 dan Capaian Renstra SKPD

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan SKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN RENJA KECAMATAN TARAJU

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya
- 3.2. Program dan Kegiatan Kecamatan Taraju Tahun 2025

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV: PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TARAJU TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024, Tahun berjalan

2024 dan Capaian Renstra 2021 - 2026

Berdasarkan DPA Kecamatan Taraju Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 5 program dijabarkan dalam 10 kegiatan dan diimplementasikan dalam 17 bentuk sub kegiatan. Realisasi program/kegiatan Kecamatan Taraju Tahun 2022 sampai dengan tahun berjalan tahun 2024 sebagai mana pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 KABUPATEN TASIKMALAYA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7					Unsur Kewilayahan								
7	01				Kecamatan								
7	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	65 (B)	N/A	59 (CC)	59 (CC)	100%	60 (CC)	100%
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33	-	-	100%	16	16	100%
7	01	01	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	-	-	100%	6	6	100%
7	01	01	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	-	-	100%	2	2	100%

7	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	0	0	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	12	12	12	100%	12	12	100%
7	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan	100				100%	100	100	100%
7	0	0	2.0	00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39	-	-	-	100%	9	9	100%
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum di Kecamatan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	0	0	2.0	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	6	6	6	100%	6	6	100%
7	0	0	2.0	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	2	1	1	100%	3	3	100%
7	0	0	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20	-	-	-	100%	5	5	100%
7	0	0	2.0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	12	12	12	100%	12	12	100%
7	0	0	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	12	12	12	100%	12	12	100%
7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	100				100%	100	100	100%
7	0	0	2.0	00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	-	-	-	100%	50	-	0%
7	0	0	2.0	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	-	-	-	100%	2	-	0%

7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	12	12	12	100%	12	12	100%
7	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	12	12	12	100%	12	12	100%
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	49	9	8	8	100%	8	8	100%
7	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan jajak dan perizinannya	1	-	-	-	100%	1	1	100%
7	0	0	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	-	-	-	100%	5	5	100%
7	0	0	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	3	1	1	100%	1	1	100%
7	1	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Taraju	81,95	79,90	80,50	80,50	100%	80,85	80,85	100%

7	0 1	0 2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Taraju	84	14	14	14	100%	14	14	100%
7	0 1	0 2	2.0 1	00 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	72	12	12	12	100%	12	12	100%
7	0 1	0 2	2.0 1	00 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	2	2	2	100%	2	2	100%
7	0 1	0 2	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumentasi hasil penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6	1	1	1	100%	1	1	100%
7	0 1	0 2	2.0 2	00 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6	1	1	1	100%	1	1	100%
7	0 1	0 2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	6	1	1	1	100%	1	1	100%
7	0 1	0 2	2.0 4	00 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	6	1	1	1	100%	1	1	100%

7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	11,11	N/A	N/A	N/A	100%	11,11	11,11	100%
7	0 1	0 3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	4				100%	1	1	100%
7	0 1	0 3	2.0 1	00 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	4	1	1	1	100%	1	1	100%
7	0 1	0 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	0 1	0 4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	78	5	5	5	100%	17	17	100%
7	0 1	0 4	2.0 1	00 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan	48	-	-	-	100%	12	12	100%
7	0 1	0 4	2.0 1	00 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	30	5	5	5	100%	5	5	100%

7	0 1	0 5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	0 1	0 5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	0 1	0 5	2.0 1	00 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	375	50	55	55	100%	60	45	75%
7	0 1	0 5	2.0 1	00 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	90	-	-	-	100%	15	-	0%
7	0 1	0 5	2.0 1	00 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48	-	-	-	100%	12	-	0%
7	0 1	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100	100	100	100	100%	100	100	100%

7	0	0	2.0		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	0	0	2.0	00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	54	9	9	9	100%	9	9	100%
7	0	0	2.0	01	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	54	9	9	9	100%	9	9	100%

Berdasarkan tabel 2.1 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Taraju s/d Tahun 2024 adalah :

- 1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut pada tabel 2.1.1.

Tabel 2.1.1

Realisasi Program / Kegiatan /Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran yang Direncanakan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)
1	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Taraju
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor
Pengadaan mebeulair	JumlahPaket Mebeulair yang disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Tingkat pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Taraju
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Taraju
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Efektifitas dengan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Taraju
PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguang Ketentrman dan ketertiban Umum yang ditindaklanjuti
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum
Sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Hasil Sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Taraju
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan kepala Daerah
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan kepala Daerah
Pembinaan kerukunan Antar Suku dan Intra suku, Umat Beragama, Rs dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan StabilitasKemanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan kerukunan Antar Suku dan Intra suku, Umat Beragama, Rs dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan StabilitasKemanan Lokal, Regional dan Nasional
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Taraju

2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target

kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah sebagaimana pada tabel 2.1.2.

Tabel 2.1.2

Realisasi program / kegiatan /Sub Kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)
1	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaratu
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Taraju
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan periznan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif

3. Realisasi program / kegiatan / hasil keluaran yang direncanakan adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Taraju, yaitu Tahun 2024 sebesar 79,05 poin dari target 82,76 poin dan target Tahun 2025 sebesar 84,33 poin.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program / kegiatan adalah :
- a) Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja adalah :
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia;
 - Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga memprioritaskan kegiatan yang lebih dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan.
 - Keterbatasan peralatan pendukung (computer / laptop yang terbatas dan kondisinya sudah tidak layak pakai.

b) Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja adalah :

- Untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Taraju sudah terpenuhi target kinerjanya walaupun tidak maksimal, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dan wajib dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah;
- Dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:

- a) Peningkatan Sumberdaya Manusia.
- b) Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang transparan dan akuntabel.
- c) Peningkatan pagu anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

Adapun rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Taraju Capaian target kinerja keuangan Tahun 2024 mencapai 98,07 % sebagaimana pada tabel 2.2. Sedangkan realisasi target kinerja keuangan Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.3.

Tabel 2.2
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kantor Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2024

Kode					Uraian /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7					Unsur Kewilayahan			
7	1				Kecamatan	1.875.580.334	1.746.496.385	93,12
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.653.015.334	1.524.771.535	92,24
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.446.805.334	1.325.992.802	91,65
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.446.805.334	1.325.992.802	91,65
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.610.000	68.950.000	96,29
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.750.000	31.750.000	100
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.800.000	3.080.000	98,40
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.400.000	5.400.000	100
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	27.660.000	25.000.000	90,38
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.300.000	23.126.233	95,17
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.500.000	6.326.233	84,35
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	16.800.000	16.800.000	100
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.300.000	106.702.500	96,74
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.100.000	96.502.500	96,41
7	1	1	2.03	38	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.200.000	10.200.000	100
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.225.500	48.225.500	100
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.892.900	15.892.900	100
7	1	2	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.892.900	15.892.900	100

7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	15.550.400	15.550.400	100
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.550.400	15.550.400	100
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	16.782.200	16.782.200	100
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	16.782.200	16.782.200	100
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	93.250.000	92.409.850	74,58
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	93.250.000	92.409.850	74,58
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	93.250.000	92.409.850	74,58
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	25.000.000	100
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	25.000.000	100
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	25.000.000	100
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	56.089.500	56.089.500	100
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	56.089.500	56.089.500	100
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	15.394.500	15.394.500	100
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	40.695.000	40.695.000	100

Tabel 2.2
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Kantor Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2025

Kode					Uraian / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7					Unsur Kewilayahan			
7	1				Kecamatan	2.210.306.452		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.210.306.452		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.637.616.152		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.637.616.152		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.610.000		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.750.000		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.800.000		
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-		
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.400.000		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	22.660.000		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.300.000		
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.500.000		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	16.800.000		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.300.000		
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.100.000		
7	1	1	2.03	38	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.200.000		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	159.065.300		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	127.010.000		
7	1	2	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	127.010.000		

7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	15.000.000		
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	17.055.300		
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	17.055.300		
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	178.400.000		
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	178.400.000		
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	178.400.000		
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000		
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000		
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29.015.000		
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	29.015.000		
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	13.320.000		
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.695.000		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Taraju

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Taraju dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TARAJU KABUPATEN TASIKMALAYA

No.	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2024	2025	2025	2022	2024	2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Taraju			N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	N/A	N/A	61 (B)	63 (B)	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Taraju			79,90	80,50	80,85	81,82	81,55	80,50	80,85	81,82	81,55	
3	Persentase peningkatan Status Desa			N/A	11,11	11,11	11,11	11,11	N/A	N/A	11,11	11,11	
4	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 4 indikator yaitu :

a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Taraju;

➤ Faktor pendorong:

Meningkatkan efektivitas pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan publik dengan anggaran yang tersedia serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP).

➤ Faktor penghambat:

Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana alat pendukung yang sudai tidak memadai.

➤ Rekomendasi :

Menambah jumlah Pegawai ASN dan peningkatan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pelayanan (pengadaan perralatan dan mesin.

b) Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti;

➤ Faktor pendorong:

Meningkatnya koordinasi dan harmonisasi antara Tokoh Agama, masyarakat dan unsur keamanan serta meningkatnya kinerja aparatur dalam menindaklanjuti laporan kejadian gangguan dari masyarakat dan desa.

➤ Faktor penghambat:

SDM aparatur dan masyarakat yang tidak cepat tanggap / apriori terhadap setiap kejadian gangguan di lingkungan sekitarnya.

➤ Rekomendasi :

Meningkatkan monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban serta sosialisasi cepat tanggap darurat kepada masyarakat dalam menghadapi setiap kejadian gangguan di lingkungannya.

c) Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani;

➤ Faktor pendorong:

Meningkatnya harmonisasi di dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan meningkatnya kondusifitas di masyarakat.

- Faktor penghambat:
Rendahnya wawasan kebangsaan dan rasa toleransi di dalam lingkungan masyarakat.
 - Rekomendasi :
Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.
- d) Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- Faktor pendorong:
Adanya pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Kecamatan.
 - Faktor penghambat:
Kualitas SDM Perangkat Desa yang masih kurang dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyusunan pelaporan
 - Rekomendasi :
➤ eningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan kepada aparaturn perangkat desa.

2. Capaian indikator dengan status tidak tercapai ada 2 indikator yaitu
- a) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Taraju, hal ini disebabkan karena belum dilaksanakannya penilaian SAKIP Kecamatan oleh Inspektorat.
 - b) Persentase peningkatan Status Desa belum tercapai karena tidak didukung oleh kegiatan dan anggaran.

2.3. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Taraju

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Taraju dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Taraju sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Taraju dari 5 indikator terdapat indikator yang belum mencapai target, yaitu:
 - a) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Taraju tidak tercapai karena disebabkan karena

belum dilaksanakannya penilaian SAKIP Kecamatan oleh Inspektorat.

- b) Persentase peningkatan Status Desa tidak tercapai karena tidak ditetapkannya program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam KUAPPAS, sehingga tidak ada kegiatan/Sub Kegiatan dan pagu anggaran untuk mencapai indikator tersebut.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Taraju, antara lain :

Sekretariat

- a. Kurangnya personil pada kesekretariatan Kantor Kecamatan Taraju, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat perlu adanya tambahan personil;
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat, khususnya sarana peralatan dan mesin penunjang pelayanan;

Seksi Pemerintahan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data administrasi pemerintahan, sehingga pengelolaan data administrasi pemerintahan belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;
- c. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan karena keterbatasan personil dan sarana prasarana pendukung;
- d. Adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Kurangnya personil pada bagian Tramtibum Kecamatan Taraju;
- c. Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Taraju.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan;
- d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.
- e. Lambatnya aparatur Desa dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Kurangnya personil pengelolaan data kesejahteraan sosial sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal;

Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka isu-isu penting dan rekomendasi untuk pelaksanaan rencana kegiatan tahun selanjutnya adalah :

- a. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
- b. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Taraju, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran

serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD. Secara umum, hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Taraju terdapat penambahan, pengurangan dan perubahan program, kegiatan, sub kegiatan. Adapun hasil telaah terhadap RKPD per program, per kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagaimana Tabel 2.5.

Tabel. 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Taraju
Kabupaten Tasikmalaya

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Taraju	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	61 (B)	1.808.330.727	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Taraju	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	61 (B)	1.808.330.727	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	25.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	25.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	100	1.567.327.727	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	100	1.567.327.727	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	1.567.327.727	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	1.567.327.727	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan	100	6.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan	100	6.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	6.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	10	6.000.000	

								Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum di Kecamatan	100	40.120.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum di Kecamatan	100	40.120.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	17.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	17.500.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3.620.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3.620.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	3.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	7.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	7.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	8.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	8.500.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	100	13.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	100	13.500.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	3.500.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	3.500.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	42.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	42.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	17.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	17.500.000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	24.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	24.500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	114.383.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	114.383.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8	100.623.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8	100.623.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan jajak dan perizinannya	1	2.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan jajak dan perizinannya	1	2.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	6.760.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	6.760.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Taraju	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Taraju	81	37.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Taraju	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Taraju	81	37.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Taraju	14	37.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Taraju	14	37.000.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	26.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	26.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan	2	11.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	2	11.000.000	

			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Dokumentasi hasil penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1	16.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Dokumentasi hasil penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1	16.000.000	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	16.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	16.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1	16.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1	16.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	16.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	16.000.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Taraju	Persentase Peningkatan Status Desa	11	29.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Taraju	Persentase Peningkatan Status Desa	11	29.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	1	29.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	1	29.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	1	29.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	1	29.000.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Taraju	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100	89.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Taraju	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100	89.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	17	89.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	17	89.000.000	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan	12	12.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan	12	12.000.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5	77.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5	77.000.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Taraju	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	100	48.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Taraju	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	100	48.500.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	48.500.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	48.500.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	65	28.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	65	28.000.000	

	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20	12.500.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20	12.500.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	8.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	8.000.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Taraju	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100	18.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Taraju	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100	18.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100	18.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100	18.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9	9.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9	9.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	9	9.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	9	9.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Taraju. Namun dalam proses ini Kecamatan Taraju mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Taraju terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Usulan Program atau Kegiatan yang dibahas dalam Musrenbang, mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang dibawa ke Forum Musrenbangdes.

Pada Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/Kelurahan, selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa/Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di Tingkat Kecamatan. Sebagai mana pada tabel 2.5.1

Tabel 2.5.1

**Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025
Dari Pemangku Kepentingan Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Aula pertemuan	Kecamatan Taraju	Jumlah Gedung/kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15 X 10 m	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup
2	Pembangunan Rumah Dinas Camat	Kecamatan Taraju	Jumlah Gedung/kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 X 9 m	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup
3	Pembangunan Rumah singgal Babinsa	Kecamatan Taraju	Jumlah Gedung/kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 x 6 m (9 Desa)	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup
4	Pembangunan Polindes / Puskesmas Pembantu	Kecamatan Taraju	Jumlah Gedung/kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 X 6 m	Dinas Kesehatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN TARAJU

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana dimaksud merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025 mengangkat tema “*Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*” dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2025 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu:

- 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- 3) Penguatan Daya Saing Usaha;
- 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
- 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
- 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
- 8) Pelaksanaan Pemilu 2025.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Taraju dalam jangka waktu Satu tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Taraju merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda- agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Taraju melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran Kecamatan Taraju pada Tahun 2025 adalah sebagaimana Tabel 3.2.1

Tabel 3.2.1

Prioritas Pembangunan dan Sasaran Kecamatan Taraju
Kabupaten Tasikmalaya

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (Outcome)
1	Pembangunan Aula pertemuan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Indek repormasi Birokrasi Kecamatan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan
2	Pembangunan Rumah Dinas Camat	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Indek repormasi Birokrasi Kecamatan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan
3	Pembangunan Rumah singgal Babinsa	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Indek repormasi Birokrasi Kecamatan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan	Meningkatnya stabilitas Polhukhankam dan Transpormasi Pelayanan Publik
4	Pembangunan Polindes / Puskesmas Pembantu	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Indek repormasi Birokrasi Kecamatan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang kesehatan

Tabel 3.2.2**Tujuan Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tahun 2025
1.	Meningkatkan kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Taraju	Indeks Reformasi Birokrasi	61 (B)

Tabel 3.2.3**Sasaran Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran Tahun 2025
1.	Meningkatkan Koordinasi Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Taraju	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81,20

Tabel 3.2.4

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya

N o.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun		
				2022	2024	2025
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Meningkatnya . Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Taraju	. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Taraju	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)
		2 Meningkatnya . kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Taraju	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Taraju	50,50	80,85	81,20
		3 Meningkatnya . kemandirian desa di wilayah Kec. Taraju	Persentase peningkatan Status Desa	N/A	11,11	11,11
		4 Meningkatnya . kondusifitas di wilayah Kec. Taraju	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
			Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
			Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%

Dari tujuan dan sasaran tersebut diatas diharapkan fungsi Kecamatan Taraju di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan semakin optimal, sehingga visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya akan terwujud.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Taraju Tahun Anggaran 2025

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Taraju Tahun Anggaran 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- 1) pendekatan tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga,
- 2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
- 3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih;
- 4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;
- 5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah.

Sub Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output*, *outcome* dan *benefit* yang sesuai dengan target sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Taraju.

Secara lebih lengkap rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 diinput dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp. 1.808.330.727,- dengan rincian uraian kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana Tabel 3.3.

Tabel. 3.3.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Unit Penan ggung Jawa b
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lok asi Out put Kegi ata n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sum ber Dan a		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana.' Pagu Indikatif	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targ et		
7					Unsur Kewilayahan														
7	01				Kecamatan														
7	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan		kec. Tar aju	Nilai Evaluasi Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan			1.808.330.727	DAU		Dana yang dibutu hkan	63 (B)	1.817.330.727	Sekret ariat	
7	01	01	2. 01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	DAU		Dana yang dibutu hkan	16	33.000.000		
7	01	01	2. 01	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000				6	11.000.000		
7	01	01	2. 01	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5.000.000				2	22.000.000		

						Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD			dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1.567.327.727	DAU		Dana yang dibutuhkan	100	1.567.827.727	
7	01	01	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya anggaran untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Tersedianya anggaran untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.567.327.727				12	1.567.827.727	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan			Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	6.000.000	DAU		Dana yang dibutuhkan	100	7.000.000	
7	01	01	2.05	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Terpenuhinya Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Terpenuhinya Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000				10	7.000.000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40.120.000	DAU		Dana yang dibutuhkan	100	34.620.000	
7	01	01	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17.500.000				6	18.000.000	
7	01	01	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan, penggandaan dan penjilidan			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan, penggandaan dan penjilidan	3.620.000				3	4.120.000	

7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dn peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dn peraturan perundang-undangan			Tersedianya bahan bacaan dn peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dn peraturan perundang-undangan	3.000.000				5	3.500.000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya Makanan dan minuman tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu			Tersedianya Makanan dan minuman tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	7.500.000				12	8.000.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya Makanan dan minuman rapat	Jumlah laporan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasiSKPS			Tersedianya Makanan dan minuman rapat	Jumlah laporan penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasiSKP S	8.500.000				12	9.000.000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran penunjang pekerjaan			Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran penunjang pekerjaan	13.500.000	DAU		Dana yang dibutu hkan	100	10.000.000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Tersedianya sarana dan prasarakan kantor	jumlah kebutuhan meja dan kursi			Tersedianya sarana dan prasarakan kantor	jumlah kebutuhan meja dan kursi	3.500.000				-	-	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya sarana dan prasarakan kantor	Jumlah kebutuhan Komputer/Leptop dan printer			Tersedianya sarana dan prasarakan kantor	Jumlah kebutuhan Komputer/Lep top dan printer	10.000.000				1	10.000.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah		Terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi, energi dan langganan internet	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet			Terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi, energi dan langganan internet	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	42.000.000	DAU		Dana yang dibutu hkan	100	42.500.000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya kebutuhan sarana komunikasi, energi dan langganan internet	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet			Tersedianya kebutuhan sarana komunikasi, energi dan langganan internet	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	17.500.000				12	18.000.000	

7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya jasa pelayanan umum kator/jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kator/jasa pengamanan kantor			Tersedianya jasa pelayanan umum kator/jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kator/jasa pengamanan kantor	24.500.000				12	24.500.000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kendaraan dinas untuk sarana dan prasarana pendukung yang memadai	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			Tersedianya kendaraan dinas untuk sarana dan prasarana pendukung yang memadai	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	114.383.000	DAU		Dana yang dibutuhkan	100	115.383.000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya kendaraan dinas untuk sarana dan prasarana pendukung yang memadai	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			Tersedianya kendaraan dinas untuk sarana dan prasarana pendukung yang memadai	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100.623.000				8	101.123.000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terbayarnya biaya pemeliharaan, Pajak dan perijina kendaraan dinas operasional	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			Terbayarnya biaya pemeliharaan, Pajak dan perijina kendaraan dinas operasional	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2.000.000				1	2.000.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya peralatan dan mesin yang memadai	Jumlah peralatan dan mesin lainnya			Tersedianya peralatan dan mesin yang memadai	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	5.000.000				5	5.000.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Tersedianya bahan bangunan dan jasa tukang untuk pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor dan banguna lainnya yang dipelihara / direhabilitasi			Tersedianya bahan bangunan dan jasa tukang untuk pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor dan banguna lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	6.760.000				1	7.260.000	

7	1	02			PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Taraju			kec. Tar aju	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Taraju			37.000.000	DAU		Dana yang dibutu hkan	81,6	71.000.000	Pemer intah an
7	01	02	2. 01		Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan		Tersedianya Dokumen Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Taraju	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Taraju		Tersedianya Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Taraju	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Taraju	37.000.000	DAU			Dana yang dibutu hkan	14	38.000.000	
7	01	02	2. 01	0 0 1	Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Tersedianya Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Tersedianya Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	26.000.000				12	26.500.000		
7	01	02	2. 01	0 0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		TersedianyaJu mlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		TersedianyaJum lah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.000.000					2	11.500.000	
7	01	02	2. 02		Penyelenggar aan Urusan Pemerintah an yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat		Tersedianya Dokumentasi hasil penyelenggara an Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan	Jumlah Dokumentasi hasil penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan		Tersedianya Dokumentasi hasil penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan	Jumlah Dokumentasi hasil penyelenggara an Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan	16.000.000	DAU			Dana yang dibutu hkan	1	16.500.000	

					Daerah yang ada di Kecamatan		oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7	01	02	2.02	002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Tersedianya Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Tersedianya Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16.000.000				1	16.500.000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Terpenuhinya Capaian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Terlaksananya Capaian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat			Terpenuhinya Capaian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Terlaksananya Capaian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	16.000.000	DAU		Dana yang dibutuhkan	1	16.500.000	
7	01	02	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Tersedianya Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			Tersedianya Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	16.000.000				1	16.500.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa			Kab . Tsm	Persentase Peningkatan Status Desa			29.000.000	DAU		Dana yang dibutuhkan	11,1	31.000.000	Pemerintah an
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Tersedianya dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa			Tersedianya dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	29.000.000	DAU		Dana yang dibutuhkan	1	31.000.000	

7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Tersedianya Laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan			Tersedianya Laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	29.000.000				1	31.000.000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			Kab Tsm	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			89.000.000	DAU			100	89.500.000	Kesos
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Tersedianya Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			Tersedianya Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	89.000.000	DAU		Dana yang dibutuhkan	17	89.500.000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Tersedianya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan			Tersedianya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan	12.000.000				12	12.000.000	

7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Tersedianya Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	77.000.000				5	77.500.000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah			kec. Taraju	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah			48.500.000	DAU		Dana yang dibutuhkan	100	49.000.000	Trantibum
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	48.500.000	DAU		Dana yang dibutuhkan	100	49.000.000	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan		Tersedianya Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan			Tersedianya Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan	28.000.000				70	28.500.000	

					dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
7	01	05	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Tersedianya Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Tersedianya Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	12.500.000				25	12.500.000	
7	01	05	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Tersedianya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Tersedianya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.000.000				12	8.000.000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan			Kab . Tsm	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan			18.000.000	DAU		Dana yang dibutuhkan	100	18.000.000	PMDE

					PEMERINTAH AN DESA	Perundang- undangan				Perundang- undangan									
7	01	06	2. 01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah n Desa		Terlaksananya Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan			Terlaksananya Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	18.000.000	DAU		Dana yang dibutu hkan	100	18.000.000	
7	01	06	2. 01	0 0 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Tersedianya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Tersedianya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.000.000				9	9.000.000	
7	01	06	2. 01	0 1 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif			Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	9.000.000				9	9.000.000	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Taraju tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala pemerintahan kabupaten yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Rencana Kerja memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Aparatur Kecamatan Taraju Tahun 2025. Kecamatan Taraju sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Taraju Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Pada dasarnya seluruh program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Taraju dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Taraju. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Taraju.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **“DENGAN SEMANGAT GOTONG**

**ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG
RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA “**

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Taraju ini juga masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Taraju Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Taraju, 02 Januari 2025

Camat Taraju



H. RONI RUHIMAT, S.Sos., M.Si

NIP. 19760530 199803 1 003